

PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN NAGARI DI NAGARI SUNGAI BULUH TIMUR KECAMATAN BATANG ANAI

Syofiarti¹

¹ Staf Pengajar Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas
Email : syofiarti@yahoo.co.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kegiatan Pelatihan Penyusunan Peraturan nagari di Nagari Sungai Buluh Timur Kecamatan Batang Anai. Dari kegiatan ini terungkap masih belum adanya pemahaman perangkat nagari dalam menyusun Peraturan Nagari. Hal ini dikarenakan bahwa Nagari sungai Buluh Timur ini merupakan nagari baru hasil pemekaran. Selama ini peraturan nagari yang ada hanya mengatur hal yang bersifat umum saja dan belum menyentuh kepada hal yang khusus sesuai dengan makna otonomi daerah. Dalam pelatihan ini metode yang digunakan adalah memberikan dasar pengetahuan tentang pembentukan peraturan nagari dan pelatihan tentang tata cara pembentukan peraturan nagari. Peraturan nagari yang dibuat sesuai dengan kebutuhan di nagari tersebut dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Pelaksanaan kegiatan ini mendapat sambutan yang sangat antusias dari perangkat nagari. Pada akhir kegiatan antara peserta dengan Bagian HAN Fakultas Hukum Unand melahirkan komitmen bagian untuk mendampingi pembuatan peraturan nagari Sungai Buluh Timur yang akan datang.

Kata kunci : Pelatihan penyusunan, Peraturan Nagari

Abstract

This article discusses the activities of the Nagari Rule Drafting Training in Nagari Sungai Buluh Timur Kecamatan Batang Anai. From this activity revealed that there is still no understanding of nagari device in arranging Nagari Regulation. This is because that Nagari Sungai Buluh Timur is a new nagari of pemekaran. So far, the existing nagari regulation only regulates the general matters only and has not touched upon the special case in accordance with the meaning of regional autonomy. In this training the method used is to provide a basic knowledge of the formation of the nagari rules and training on the procedures for the formation of the nagari rules. The nagari regulations are made according to the needs of the nagari by forming small groups. The implementation of this activity received a very enthusiastic response from the nagari device. At the end of the activity between the participants with the Bagian HAN of the Faculty of Law Unand gave birth to a part commitment to accompany the coming arrangement of the next Nagari Sungai Buluh Timur.

Keywords: Training of drafting, Nagari Regulation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Nagari Sungai Buluh Timur merupakan nagari paling timur dalam Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Nagari ini adalah merupakan salah satu nagari pemekaran dari nagari Sungai Buluh. Nagari ini memiliki aset berupa hutan nagari yang kemudian dijadikan sebagai objek

wisata dengan adanya rumah pohon di kawasan hutan tersebut. Objek wisata ini sangat potensial sekali untuk menambah pendapatan nagari.

Disamping itu dalam memanfaatkan kawasan hutan Nagari salah satunya memanfaatkan jasa lingkungan dapat melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan penyimpanan karbon. Hutan Nagari Sungai Buluh selain jasa pemanfaatan air bagi PDAM juga mengelola potensi jasa lingkungan berupa rumah pohon. Objek wisata rumah pohon yang banyak dikunjungi ini menyatu dengan objek wisata air terjun Sarasah Batang Buluah sehingga wisatawan dapat menikmati dua objek wisata dengan sensasi yang berbeda.

Melihat situasi sebagaimana yang diungkapkan di atas, tentunya aparat pemerintahan nagari harus bisa mengatasi setiap persoalan yang mungkin akan dihadapi oleh nagari tersebut (misalnya dalam pengelolaan objek wisata atau bidangbidang lainnya), terutama dalam mengambil berbagai kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di nagari, karena masalah yang akan dihadapi oleh nagari ini akan sangat kompleks. Selama ini peraturan nagari yang ada hanya mengatur hal yang bersifat umum saja dan belum menyentuh kepada hal yang khusus sesuai dengan makna otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh nagari maka nagari dapat membentuk berbagai produk hukum agar penyelenggaraan pemerintahan nagari dapat terselenggara dengan baik. Produk hukum nagari (Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari atau Keputusan Wali Nagari) merupakan salah satu sarana untuk penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Disadari atau tidak, dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari tersebut tentu masih ada keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) yang dipunyai oleh perangkat pemerintahan nagari dalam membuat suatu produk hukum nagari. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan nagari tidak dapat terlaksana secara optimal. Akibat lebih lanjut adalah tidak banyak produk hukum nagari tersebut dapat menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan nagari secara umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara khusus.

Dari apa yang dikemukakan di atas, diperlukan pelatihan sebagai keterampilan dasar dalam menghasilkan produk hukum di tingkat nagari khususnya Peraturan Nagari, sehingga secara langsung dapat menunjang keberhasilan dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Urgensi Permasalahan Prioritas

Dalam perkembangannya, penyelenggaraan pemerintahan di nagari masih banyak mengalami kendala dan hambatan. Hal ini disebabkan karena masih belum pahamnya aparat pemerintahan nagari dalam membuat berbagai aturan dan kebijakan yang terkait dengan nagari, sehingga sering ditemui berbagai konflik di nagari itu sendiri. Terutama kebijakan yang pengaturannya lebih khusus. Disamping itu keterbatasan sumberdaya manusia yang ada di nagari dalam membuat aturan dan kebijakan di nagari (produk hukum nagari) juga menjadi faktor utama tidak optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di nagari. Munculnya permasalahan di nagari sebagian disebabkan oleh ketidakmampuan daerah dalam membuat aturan maupun keputusan yang benar berdasarkan hukum formal dan prosedur yang legal. Untuk itu pelatihan penyusunan produk hukum nagari tersebut sangat bermanfaat agar perangkat pemerintahan nagari bisa lebih memahami bagaimana membuat suatu produk hukum agar dalam penyelenggaraan pemerintahan di nagari tidak lagi terkendala dan setiap permasalahan ataupun konflik yang terjadi di nagari dapat di atasi dengan baik.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah memberikan dasar pengetahuan tentang pembentukan produk hukum nagari dan praktik tentang tata cara pembentukan produk hukum nagari. Kerangka pemecahan masalah yang dilakukan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh pemerintahan nagari, dapat dirumuskan pada Tabel 1.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan Tim Pelaksana dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas yaitu Staf Pengajar bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas yang masingmasing anggota tim memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang akan diberikan dan apa yang sangat dibutuhkan di nagari.

Tabel 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Kondisi Saat Ini	Pelatihan Penyusunan Peraturan Nagari	Kondisi Setelah Pelatihan
Permasalahan : - Masih kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh aparat nagari dalam membuat peraturan nagari - Masih banyaknya ditemui berbagai persoalan di nagari - Adanya keterbatasan sumberdaya manusia dalam membuat peraturan nagari	Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan kemampuan aparat nagari dalam membuat berbagai peraturan nagari Bentuk Pelatihan - Ceramah - Praktek penyusunan peraturan nagari - Studi kasus	- Mampu membuat peraturan nagari - Dengan adanya produk hukum nagari, aparat mampu mengatasi setiap persoalan yang terjadi di nagari - Penyelenggaraan pemerintahan di nagari dapat terselenggara secara optimal sesuai dengan tujuan otonomi daerah

Anggota atau khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan pelatihan penyusunan peraturan nagari adalah :

- Wali Nagari
- Sekretaris Nagari
- Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)
- Kepala Jorong
- Pemuka Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka percepatan pembangunan Desa/Nagari Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama dengan sebelas Perguruan Tinggi di Indonesia, salah satunya Universitas Andalas untuk membuat model pembangunan Desa/Nagari melalui program PERTIDES (Perguruan Tinggi untuk Desa). Dengan pertimbangan itu atas nama Universitas Andalas dalam hal ini Nagari Development Center (Pusat Pengembangan Nagari) memilih beberapa Nagari yang dijadikan salah satu Nagari model binaan Universitas Andalas. Untuk pelaksanaan itu Universitas Andalas sudah memilih sepuluh Program Studi (Jurusan) pada berbagai Fakultas yang ada di Universitas Andalas sebagai pembina di Nagari. Salah satunya adalah Nagari Sungai Buluh Timur.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Pelatihan Penyusunan Peraturan Nagari” ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pengabdian itu sendiri. Materi ceramah yang disampaikan bisa dikatakan dapat menambah pengetahuan para peserta pelatihan. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya para peserta pada waktu mendengarkan dan menyimak materi yang disampaikan, serta banyaknya pertanyaan yang muncul setelah materi pelatihan disajikan.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini sangat ditanggapi positif oleh masyarakat di Nagari Sungai Buluh Timur. Peserta pelatihan diantaranya adalah Sekretaris Nagari, Ketua KAN, para pemuka masyarakat, Kepala Jorong dan pemuda. Pada awal pelatihan terlihat para peserta masih banyak yang belum memahami bagaimana teknik penyusunan Peraturan nagari. Hal ini dimungkinkan karena Nagari Sungai Buluh Timur merupakan Nagari pemekaran, sehingga masih belum memiliki produk hukum nagari. Ditambah lagi keterampilan sumberdaya manusia sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan di nagari masih terbatas terutama dalam hal pengambilan keputusan, sementara perangkat hukum yang ada pun masih belum memadai. Melihat kondisi seperti ini sangat penting sekali dilaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka memaksimalkan kemampuan aparat nagari dalam menyusun peraturan nagari, agar seluruh kegiatan di nagari dapat terselenggara dengan baik serta kehidupan masyarakat di nagari dapat tertata dengan baik.

Tujuan kegiatan pelatihan penyusunan peraturan nagari untuk memberikan edukasi baik teori maupun praktik langsung dalam penyusunan peraturan nagari oleh pejabat yang berwenang di nagari. karena masih banyak pejabat pemerintahan di nagari yang tidak mengerti cara menyusun dan membuat peraturan nagari sebagai produk hukum nagari yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Kegiatan ini dirancang untuk menilai perubahan penyelenggaraan pemerintahan di nagari oleh aparat pemerintahan nagari. Dalam hal ini dilakukan penilaian terhadap penerapan ilmu pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam membuat peraturan nagari sesuai dengan kebutuhan nagari dan pemecahkan permasalahan yang terjadi di nagari.

Pelatihan penyusunan peraturan nagari (Pernag) ini dilakukan dengan dua sesi, sesi pertama dilakukan dengan cara mempresentasikan teori-teori dasar dalam pembuatan Peraturan Nagari kepada peserta. Dalam presentasi teori ini, materi yang diberikan mulai dari dasar hukum

penyusunan Pernag, tahap-tahap pembuatan Pernag sampai Pernag yang wajib dimiliki nagari seperti Pernag tentang APBNagari.

Sedangkan sesi kedua, mempraktikkan penyusunan Pernag oleh peserta dengan membagi mereka kedalam dua kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari tujuh orang, tiap-tiap kelompok didampingi oleh tim pengabdian.

Kelompok pertama memilih membuat Pernag Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan kelompok kedua membuat Pernag Tentang Pengelolaan Objek Wisata sesuai potensi nagarinya. Tim pengabdian memberikan arahan dan petunjuk teknis pembuatan Pernag mulai dari konsiderans menimbang, mengingat sampai membuat ketentuan Bab 1 Pasal 1 Pernag yang semuanya dipraktikkan langsung oleh masing-masing kelompok.

Kegiatan pelatihan penyusunan Pernag ini sangat diantusias oleh peserta, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang responsif dan konstruktif dari peserta. Indikasi keberhasilannya dapat dilihat bahwa setelah materi ceramah disampaikan dan dilanjutkan dengan diskusi, curah pendapat dan berbagi pengalaman, dengan metode partisipatif terlihat banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta. Hal ini menunjukkan antusias masyarakat akan keingintahuan mereka terhadap tata cara penyusunan Peraturan Nagari dalam rangka menghadapi setiap persoalan yang terjadi di nagari. Acara ini ditutup dengan komitmen bagian HAN Fakultas Hukum Unand untuk mendampingi pembuatan peraturan nagari Sungai Buluh Timur yang akan datang.

Dampak dari kegiatan pelatihan ini dapat dievaluasi secara kualitatif dengan adanya perubahan dan peningkatan kemampuan aparat pemerintahan nagari dalam menerbitkan peraturan nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan di nagari serta menanggulangi setiap permasalahan yang dihadapi oleh nagari.

KESIMPULAN

Peserta yang mengemukakan pendapat dan gagasan cukup variatif. Dari hasil diskusi, curah pendapat, serta berbagi pengalaman yang mengemukakan, terindikasi berbagai kondisi, diantaranya :

1. Masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa adanya Peraturan Nagari sangat penting dalam penyelenggaraan nagari.
2. Dalam proses penyusunannya tentunya harus didukung oleh kemampuan pihak aparat nagari.

3. Sampai saat ini masyarakat di nagari masih banyak membutuhkan berbagai kebijakan yang terkait dengan kepentingan nagari agar penyelenggaraan pemerintahan di nagari dapat berjalan dengan baik dan masyarakat nagari bisa hidup lebih teratur dan terarah.
4. Peserta masih banyak mengharapkan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali, dan tidak tertutup terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini merupakan Program Iptek Bagi Desa Mitra (IbDM) oleh LPPM Universitas Andalas melalui *Nagari Development Center* (Pusat Pengembangan Nagari) yang menggagas program PERTIDES (Perguruan Tinggi Untuk Desa), karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Andalas dan Ketua LPPM Universitas Andalas yang telah mempercayakan Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas sebagai salah satu tim pelaksana, termasuk pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnidar Agus, 2000, *Kembali Pada Pemerintahan Nagari*, Makalah pada Seminar Sehari di Air Haji Tanggal 30 Desember 2000.
- Kurnia Warman, 2000, *Mewujudkan “Kembali” Pemerintahan Nagari*, Makalah pada Seminar Bagian HAN Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tanggal 19 April 2000.
- Syahmunir, 2001, *Pemerintahan Nagari dan Desa Serta Perkembangannya di Sumatera Barat*, Pidato Pengukuhan, Disampaikan pada Rapat Senat Luar Biasa Universitas Andalas, 5 Januari 2001
- Yuliandri, 2001, *Pembentukan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah Lainnya*, tulisan dalam Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm, Padang.
- Yuslim, 2008, *Pemerintahan Nagari Ideal Menurut Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Makalah pada Seminar Bagian HAN Fakultas Hukum Universitas Andalas, 28 April 2008.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari